



HARIAN

LENTERA

Inspirasi Perubahan **TODAY**

Edisi Rabu, 07 Juni 2023

KORAN DIGITAL
LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat
12 Halaman
download edisi digital
www.lenteratoday.com
**VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021**

www.lenteratoday.com

@lenteratoday

f lentera.tv

@lenteratoday

Lentera TV Media

LenteraPodcast

@lenteratoday

TARGET SATGAS BLBI KANDAS

Target Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) mengejar Rp 110 triliun utang para obligor hingga akhir ini kandas. Saat ini Satgas baru mampu menagih debitur senilai Rp 30,65 triliun. Pemerintah pun bakal memperpanjang masa tugas Satgas yang dipimpin Mahfud Md ini. Untuk diketahui, Satgas BLBI baru beroperasi 2 tahun sejak terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021, dan masa tugasnya akan berakhir pada 31 Desember 2023. Melihat kompleksnya hambatan, pemerintahan saat inipun bersiap melimpahkan ke presiden berikutnya setelah selesai Pemilu 2024. Sanksi keras juga sudah disiapkan bagi pengemplang BLBI yang nekat tak mau bayar utang ke negara. Mulai dari pencekalan ke luar negeri, pencabutan paspor, hingga pencabutan hak kredit.

(Baca Hal 11)



BLBI

**Government (Hal.2)
Sidang Perdana
Mario Dandy,
Ayah David Ozora:
Penguasa
Jaksel**

RINCIAN HIBAH PENGUNAAN ASET EKS BLBI

14 kementerian/lembaga

1. Penetapan status penggunaan kepada Kepolisian, dengan total luas 60,04 ha, diantaranya digunakan untuk pembangunan Gedung RS Bhayangkara Pusat Polri.
2. Penetapan status penggunaan kepada Badan Pengawas Pemilu dengan total luas seluruhnya 3.546 m², digunakan untuk pembangunan Gedung Kantor Bawaslu.
3. Penetapan status penggunaan kepada Badan Intelijen Negara (BIN) berupa satu bidang tanah dan bangunan di Kota Surabaya, seluas 1.890 m².
4. Penetapan status penggunaan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) berupa satu bidang tanah dan bangunan di Kota Bekasi seluas 144 m².
5. Penetapan status penggunaan kepada Kejaksaan Agung berupa tanah luas seluruhnya 3,74 ga. Digunakan untuk pembangunan gedung kantor dan barang bukti.
6. Penetapan status penggunaan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa satu bidang tanah dan bangunan di Kabupaten Sidoarjo seluas 135 m².
7. Penetapan status penggunaan kepada Kementerian Keuangan berupa tanah seluas 1,65 ha.
8. Penetapan status penggunaan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berupa tanah seluas 11,72 ha untuk pembangunan gedung.
9. Penetapan status penggunaan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa satu bidang tanah di Kota Bandar Lampung seluas 22.360 m².
10. Penetapan status penggunaan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) berupa satu bidang tanah di Kota Depok seluas 7.000 m².
11. Penetapan status penggunaan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berupa satu bidang tanah di Kabupaten Bekasi seluas 15.155 m².
12. Penetapan status penggunaan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berupa tanah seluas 2,19 ya untuk pembangunan gedung.
13. Penetapan status penggunaan kepada Komisi Yudisial berupa satu bidang tanah di Kabupaten Badung seluas 254 m².
14. Penetapan status penggunaan kepada Badan Nasional Narkotika berupa satu bidang tanah di Kota Cimahi seluas 3.040 m².

3 Pemerintah Daerah

1. Hibah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas aset yang berlokasi di Kabupaten Cianjur. Dengan luas 1.376.680 m² senilai Rp 601,76 miliar, untuk pembangunan ekowisata West Java Creative Forest.
2. Hibah kepada Pemerintah Provinsi Banten atas aset yang berlokasi di Kota Tangerang Selatan, seluas 10.130 m² senilai Rp 19,58 miliar sebagai Pusat UMKM dan pelayanan pajak daerah.
3. Hibah kepada Pemerintah Kota Palembang atas aset yang berlokasi di Kota Palembang, seluas 34.255 m² senilai Rp 18,14 miliar untuk kompleks perkantoran dan sarana prasarana pendukung lainnya.



Sidang Perdana Mario Dandy, Ayah David Ozora: Penguasa Jaksel



Mario Dandy Satrio (20) (kanan tampak berjalan tegap) dan Shane Lukas (19) (kiri tampak menunduk) saat tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalani sidang perdana terhadap kasus penganiayaan D (17), Selasa (6/6/2023). (istimewa)

JAKARTA-Mario Dandy Satrio (20) dan Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoran (19) menjalani sidang dakwaan terkait perkara penganiayaan berat terhadap anak, Cristalino David Ozora (17) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023). Mereka didakwa melakukan penganiayaan berat terencana terhadap anak.

Sebelum sidang dimulai, Ayah David Ozora (korban), Jonathan Latumahina, sempat meneriaki Mario Dand, "Penguasa Jaksel!" Meski tak ada penjelasan dari Jonathan soal maksud sebutan 'penguasa Jaksel' tersebut. Tapiceletukan ayah David itu disambut sejumlah pengunjung sidang yang hadir.

Bahkan ada yang nyeletuk soal 'penguasa pajak'. Hal ini merujuk ke ayah Mario Dandy, Rafael Alun Trisambodo. Sebelum menjadi tersangka KPK, Rafael Alun menjabat Kepala Bagian Umum DJP Kanwil Jakarta Selatan.

Ayah David hadir langsung pada sidang perdana Mario Dandy dan Shane Lukas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jonathan datang bersama kuasa hukum David dan sejumlah rombongan. Ayah David juga terlihat ditemani sejumlah anggota berseragam Banser NU. Jonathan masuk ke ruang sidang dan langsung duduk di barisan terdepan. Sebelum duduk, nampak ia maju mendekati ke kursi terdakwa, tempat Mario Dandy duduk. "Penguasa Jaksel,"celetuk Jonathan ke Mario.

Kalimat pendek itu lalu disambut pengunjung lain: "Penguasa Jaksel", "Apa yang dikuasai?" "Pajak..." ,sahut pengunjung lain.

Dikethui, ayah David, Jonathan

Latumahina, dan paman David, Rustam Hatala, bakal menjadi saksi di sidang Mario Dandy. "Saya dan Paman Rustam yang bikin laporan di Polsek," kata Jonathan usai persidangan di PN Jaksel.

Jonathan mengatakan akan menjelaskan kondisi David. Dia mengatakan bersama keluarga besar David akan terus mengawal kasus tersebut. "Yang akan saya tekankan nanti adalah kondisi David yang memang itu penganiayaan berat dan perencanaan karena tadi tidak disebutkan ada hal yang awal tadi saya sampaikan, nanti Mellisa akan sampaikan itu, besok akan saya ulang lagi sampai benar-benar ini menjadi suara yang bisa mewakili keadilan,"ujarnya.

Sebelumnya, sidang Mario Dandy Satrio terkait kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora berlanjut ke pemeriksaan saksi. Hakim meminta jaksa penuntut umum (JPU) mendahulukan keluarga David untuk dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan.

Hakim mengatakan sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi usai Mario Dandy tak mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa. Sidang pemeriksaan saksi akan digelar dua kali pada Selasa (13/6/2023) dan Kamis (15/6/2023) pekan depan.

"Kalau begitu kita akan lanjutkan untuk, kita jadwalkan untuk saksi, perlu diketahui untuk saksi kita akan jadwalkan Minggu depan itu dua kali dalam satu minggu, Selasa dan Kamis. Nah, untuk saksi-saksi kami mohon kepada JPU mendahulukan saksi-saksi yang ada di TKP, pertama itu dari security, terus yang kedua, dari keluarga korban dulu ya, keluarga korban ada, dua orang," kata hakim ketua Alimin Ribut Sujono dalam persidangan di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023).

Hakim meminta jaksa tak langsung menghadirkan 10 saksi di sidang pada Selasa (13/6) pekan depan. Hakim meminta saksi yang dihadirkan sebanyak lima orang, yaitu keluarga

David dan orang yang berada di tempat kejadian perkara (TKP).

"Security kan tiga, lima aja dulu," kata hakim. "Berati hari Selasa lima saksi dulu majelis," jawab jaksa. "Lima saksi dulu tapi keluarga dari anak David didahulukan," timpal hakim.

Shane Lukas Minta Beda Sel

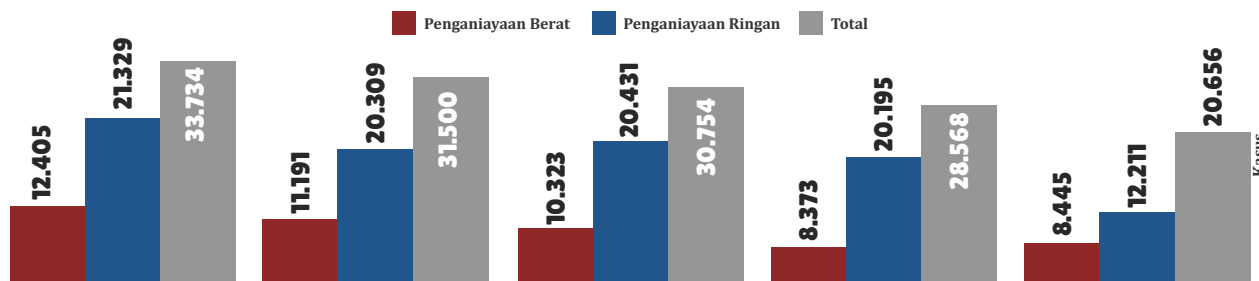
Di sisi lain, permintaan terdakwa Shane Lukas (19) pisah sel tahanan dari Mario Dandy Satrio (20) dikabulkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Diketahui, Shane dan Mario Dandy ditahan di Lapas Salemba, Jakarta Pusat, sejak Selasa (30/5/2023). Keduanya dipindah ke Lapas Salemba setelah sebelumnya ditahan di Rutan Kelas 1 Cipinang.

"Majelis menyikapi, jadi permohonan saudara dikabulkan," kata Hakim Ketua Alimin Ribut Sujono dalam persidangan, Selasa (6/6/2023). Alimin menambahkan jika pihak Shane meminta penetapan secara tertulis, maka pihaknya siap untuk membuatkan.

Sementara itu, kuasa hukum Shane Lukas, Happy Sihombing menuturkan alasan kliennya meminta pemisahan sel tahanan demi menghindari tekanan sosial dan psikologis dari Mario Dandy. Terlebih, menurut dia, tekanan yang dialami Shane sudah dialami bahkan sebelum terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy kepada korban David pada Senin (20/2/2023). "Adanya penekanan sosial dan psikologis dari Mario yang bisa mempengaruhi kondisi psikologis dan independensi dari terdakwa," ujar Happy.

Mario sudah melakoni sidang pembacaan dakwaan atas penganiayaan David Ozora. Dalam perkaranya, Mario dan Shane Lukas serta perempuan A didakwa secara bersamaan melakukan penganiayaan berat berencana ke David. Atas perbuatannya itu, jaksa mendakwa Mario dan Shane Lukas dengan Pasal 355 ayat (1) KUHP atau Pasal 353 ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 76 C juncto Pasal 80 ayat (2) UU Perlindungan Anak. (wid,rls,ant/dya)

JUMLAH KASUS PENGANIAYAAN DI INDONESIA BERDASARKAN JENISNYA (2017-2021)





Anggaran Pemilu 2024 Disiapkan Dua Putaran

JAKARTA- Pemerintah telah me-nyiapkan anggaran untuk pemilihan umum (Pemilu) yang sudah bisa dicairkan pada 2023 dan 2024. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku sudah me-nyiapkan anggaran tambahan jika Pemilu 2024 berlangsung 2 putaran.

"Kalau ada 2 putaran kita sudah ada dana kontijensi kalau sampai terjadi dua ronde karena itu anggaran-nya cukup signifikan," kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (6/6/2023).

Meski begitu, dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemilu dicairkan secara bertahap sesuai dengan siklus di masing-masing lembaga. "Anggaran Pemilu kita siapkan untuk 2023-2024, untuk penyelenggaraannya sendiri dari KPU, kemudian Bawaslu, kita mengikuti siklusnya, jadwalnya," kata dia.

Pencairan dana pemilu di tahun 2023 sudah dilakukan pada Februari lalu. Dana tersebut digunakan untuk menyiapkan berbagai kebutuhan seperti logistik, distribusi orang, saksi dan lain-lain. Berbagai kebutuhan tersebut memang bagian dari tanggung jawab APBN dalam mendukung pesta demokrasi 5 tahunan. "Jadi ini semua perhelatan demokrasi ini sudah masuk dalam APBN yang sedang kita susun," kata dia.

Hanya saja, Sri Mulyani enggan membeberkan besarnya dana pemilu untuk tahun 2024. Termasuk besarnya dana persiapan untuk pilpres jika berlangsung 2 putaran di tahun depan. "Nanti bapak Presiden akan me-nyampaikan di DPR. Detailnya sebagian langsung masuk di K/L terkait, dan sebagian kita cadangkan dulu sebelum keluar, tidak akan dikeluarkan anggarannya," kata dia.

Sebelumnya, Sri Mulyani me-nyebutkan Pemilu 2024 dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp25 triliun untuk tahun anggaran 2022 dan 2023. Namun angka tersebut bersifat sementara karena alokasi untuk tahun anggaran 2024 masih dalam perhitungan. "Anggaran untuk Pemilu kami sediakan memadai dan tentu tetap dengan bijaksana," ucap Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (3/2/2023), dikutip dari Antara.

Secara rinci, alokasi anggaran tersebut meliputi sebanyak Rp15,49 triliun untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebesar Rp6,91 triliun untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan senilai Rp2,61 triliun untuk kementerian/lembaga.

Sri Mulyani me-nyebutkan Pemilu



KPU melakukan sosialisasi Pemilu 2024 dengan membagikan flyer dan stiker yang memuat hari dan tanggal pemungutan suara, daftar partai politik peserta pemilu hingga ajakan melakukan pengecekan DPT. (dok.KPURI)

2024 akan diikuti 18 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh, yang diharapkan seluruhnya masuk dalam arena kompetisi politik untuk menawarkan kepada bangsa dan rakyat sebuah masa depan Indonesia dengan tata kelola yang baik dan pilihan-pilihan kebijakan yang baik.

KPU Hapus Wajib Laporkan Dana Kampanye

Di sisi lain, Kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak mewajibkan peserta pemilihan umum (Pemilu) 2024 me-nyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dinilai sebagai sebuah kemunduran. Judhi Kristantini, perwakilan Masyarakat Indonesia Antikorupsi untuk Pemilu Berintegritas, me-nyatakan bahwa aturan itu mesti dipertahankan demi menjaga pemilu yang transparan dan akuntabel.

"Kami sungguh khawatir bahwa ini akan merupakan kemunduran dari proses pendidikan kita sebagai bangsa terhadap transparansi dan akuntabilitas," kata Judhi di kantor KPU RI, Jakarta Selasa (6/6/2023).

Judhi me-nyatakan, isu transparansi dan akuntabilitas mesti me-nyaji perhatian karena sangat penting untuk kehidupan politik dan demokrasi yang berintegritas. Padahal, upaya mendidik publik untuk memilih calon yang berintegritas sudah sejak lama dilakukan oleh banyak pihak. Salah satunya dengan mewajibkan peserta pemilu me-nyerahkan LPSDK.

Apalagi, menurut Judhi, kewajiban me-nyerahkan LPSDK nyatanya tidak

dipatuhi oleh semua peserta pemilu dari pengalaman di Pemilu 2019. "Kami berpikir bahwa waktu itu saja hanya 87 persen yang me-nyerahkan LPSDK, jadi ada 13 persen peserta pemilu yang tidak me-nyerahkan," ujarnya.

Judhi me-nyambahkan bahwa kebijakan KPU yang kini sekadar mendorong peserta pemilu untuk me-nyerahkan dana kampanye tidaklah cukup. "Kita tahu bahwa dorongan itu tidak punya kekuatan yang cukup untuk me-nyaksa sebuah kewajiban ditunaikan," kata Judhi.

Sebelumnya, KPU RI me-nyebutkan bahwa LPSDK dihapus karena tidak secara eksplisit diatur di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hal itu di-nyatakan KPU dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI dan pemerintah pada Senin lalu. Sebagai informasi, kewajiban lapor LPSDK sudah diterapkan sejak Pemilu 2014. Dalam skala nasional, peserta Pemilu 2019 pun masih diberikan kewajiban ini meskipun UU Pemilu sudah diundangkan.

Di sisi lain, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik me-nyatakan, dihapusnya LPSDK untuk Pemilu 2024 juga tidak terlepas dari singkatnya masa kampanye pada pemilu kali ini yang hanya 75 hari. Sebagai alternatif, KPU bakal mendorong peserta pemilu untuk memperbarui informasi terkait penerimaan dan pengeluaran dana kampanye mereka melalui aplikasi Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam). (wid,rls,ist/dya)U ini," ucapnya.(wid,rls,ist/dya)

SKENARIO BILA PEMILU 2 PUTARAN

BILA 1 PUTARAN

- Penyusunan peraturan KPU: 14 Juni 2022 hingga 14 Desember 2023.

- Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih: 14 Oktober 2022 hingga 21 Juni 2023.

- Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu: 29 Juli 2022 hingga 13 Desember 2022.

- Penetapan peserta pemilu: 14 Desember 2022.

- Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan: 14 Oktober 2022 hingga 9 Februari 2023.

- Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden: 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023.

- Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota: 24 April 2023 hingga 25 November 2023.

- Pencalonan Anggota DPD: 6 Desember 2022 hingga 25 November 2023.

- Masa kampanye pemilu: 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

- Masa tenang: 11 hingga 13 Februari 2024.

- Pemungutan suara: 14 Februari 2024.

- Penghitungan suara: 14 hingga 15 Februari 2024.

- Rekapitulasi hasil penghitungan suara: 15 Februari 2024 hingga 20 Maret 2024.

- Penetapan hasil pemilu tanpa permohonan perselisihan hasil pemilu: paling lambat 3 hari setelah KPU menerima surat pemberitahuan dari MK.

- Penetapan hasil pemilu dengan permohonan perselisihan hasil pemilu: paling lambat 3 hari setelah putusan MK.

- Pengucapan Sumpah/Janji Presiden/Wakil Presiden: 20 Oktober 2024.

- Pengucapan Sumpah/Janji DPR dan DPD: 1 Oktober 2024.

- Pengucapan Sumpah/Janji DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota: disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing Anggota.

BILA 2 PUTARAN

- Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih: 22 Maret hingga 25 April 2024.

- Masa kampanye pemilu: 2 hingga 22 Juni 2024.

- Masa tenang: 23 hingga 25 Juni 2024.

- Pemungutan suara: 26 Juni 2024.

- Penghitungan suara: 26 hingga 27 Juni 2024.

- Rekapitulasi hasil penghitungan suara: 27 Juni hingga 20 Juli 2024.

- Penetapan hasil pemilu tanpa permohonan perselisihan hasil pemilu: paling lambat 3 hari setelah KPU menerima surat pemberitahuan dari MK.

- Penetapan hasil pemilu dengan permohonan perselisihan hasil pemilu: paling lambat 3 hari setelah putusan MK.

- Pengucapan Sumpah/Janji Presiden/Wakil Presiden: 20 Oktober 2024.

DKP Jatim bersama KKP RI Sosialisasi Fasilitas Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan

SURABAYA-Sosialisasi Fasilitas Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya ikan atau SeHaTkan dilaksanakan pada 11 Mei 2023 di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur (Jatim). Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi pembudidaya dalam pengajuan SeHaTkan di Jawa Timur.

Dalam acara itu, hadir perwakilan Dinas Perikanan, Kantor Pertanahan dan pembudidaya dari kabupaten/kota di Jawa Timur dengan narasumber dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang-Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) dan Kanwil ATR-BPN Jawa Timur sebagai kolaborator program SeHaTkan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI).

Sosialisasi ini di Hadiri oleh perwakilan Kab/Kota di Jawa Timur pada sektor perikanan Budidaya. Turut hadir juga sekaligus menjadi

narasumber, Kepala Bidang Perikanan Budidaya DKP Jatim; Sub. Koordinator pemberdayaan pembudidaya Dinas Perikanan Kab. Sidoarjo; Perwakilan dari Kemeterian ATR/BPN Kanwil Provinsi Jawa Timur; Sub. Koordinator Dinas Perikanan Kab. Gresik.

Penyampaian materi dalam sosialisasi diantaranya terkait Peraturan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 112 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan pengembangan perikanan budidaya. Serta memiliki fungsi merumuskan kebijakan pengembangan perikanan budidaya di Jawa Timur.

Dalam Sosialisasi tersebut Kepala Bidang Perikanan Budidaya menyampaikan setelah program SeHaTkan, para pembudidaya dapat memanfaatkan sebagai penunjang sumber peminjaman modal. Baik pada Bank, Koperasi, UMKM, dan BMT (Baitul Maal wa Tamwil) yang diharapkan mampu mendorong produksi perikanan Jawa Timur.

Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo pada Penyerahan Sertifikat Redistribusi & Hasil Penyelesaian Konflik, 22 September 2021. "Pemerintah tidak hanya menyerahkan sertifikat tanah saja. Saya minta kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk juga menyalurkan bantuan-bantuan berupa modal, bibit, pupuk, pelatihan-pelatihan, agar



Kegiatan Sosialisasi Fasilitas Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya ikan atau SeHaTkan pada 11 Mei 2023 di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur (Jatim). (Dok. DKP Jatim)

tanah yang digarap oleh Bapak-Ibu penerima manfaat reforma agraria ini lebih produktif," ujar presiden saat itu.

Senada, ketika pembukaan Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Summit) 2022 di Marina Togo Mowondu, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis, 9 Juni 2022 "Seluruh jajaran pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk dapat saling terbuka, bersinergi, dan menghindari adanya ego sektoral dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada di masyarakat, salah satunya mengenai sengketa lahan," tutur presiden.

Dengan dasar hukum sertifikasi hak atas tanah lintas sektor, pelaksanaan sertifikasi hak atas tanah pembudidaya ikan di Jawa Timur dilakukan dengan tahapan perencanaan. Yakni perencanaan target PBT

SHAT dan anggaran. Kemudian tahap penyampaian daftar CPCL ke kantor pertanahan. Kemudian persiapan atau penetapan CPCL dan pembentukan tim pelaksana kegiatan pendaftaran tanah lintas sektor.

Setelah tahap persiapan akan dilaksanakan pengumpulan data yuridis, pengumpulan data fisik, pemeriksaan tanah, penerbitan keputusan penegasan konversi/-pengakuan HAT dan keputusan pemberian hak, pembukaan dan penerbitan sertipikat.

Program SeHaTkan ini diharapkan sebagai upaya percepatan pendaftaran tanah dapat dilakukan melalui PTSL maupun melalui kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Lintas Sektor). Serta mewujudkan program pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui kegiatan sertifikasi hak atas tanah untuk peningkatan akses permodalan. (ADV)



Pemerintah Ultimatum Lagi Pedagang Thrifting Wamendag: Silakan Habiskan Dagangannya

JAKARTA-Himpunan Pedagang Pakaian Impor Indonesia (HPPII) bersama pedagang pakaian bekas impor (thrifting) berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag). Larangan penjualan pakaian bekas impor dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga pun menanggapi tuntutan tersebut. Dia menegaskan penjualan pakaian bekas diizinkan, selama tidak melanggar aturan yang ada.

Diterangkannya, penjualan pakaian bekas dilarang karena ada ketentuan Permendag Nomor 40 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

"Seperti yang Pak Menteri katakan bahwa jualannya adalah dilihat sebagaimana yang dilakukan para

pedagang selama tidak melanggar aturan. Yang penting impornya yang kita larang," kata Jerry saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/6/2023).

Lebih lanjut, Jerry mengatakan, para pedagang masih diperbolehkan untuk menjual stock dagangannya hingga barangnya habis. Namun, dia menekankan agar para pedagang tersebut berhenti melakukan impor pakaian bekas dari luar negeri. Sebab, yang akan ditindak oleh pemerintah ialah impornya, bukan perdagangannya. "Thrifting jualannya dan bagaimana jualannya itu seperti kata Pak Mendag, silahkan dihabiskan barang dagangannya," ungkap Jerry.

Diketahui, para peserta demo menuntut untuk bertemu dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas). Deson selaku orator massa, menagih janji Zulhas saat kunjungan ke Pasar Senen pada Maret lalu. Zulhas kala itu menjanjikan penjual barang-

barang bekas impor akan menerima barang-barang lokal, sebagai ganti baju impor yang disita dan dibakar.

"Pada 30 Maret 2023, di Pasar Senen, (Mendag Zulhas) menjanjikan tindak lanjut, tapi nol besar hingga saat ini. Ingin membantu peralihan (ke produk lokal), tapi tidak ada bukti nyata. Justru semakin menekan para pedagang, dan mengancam mengeluarkan Perpres impor pakaian bekas atau thrifting, tapi melarang perdagangannya," tegasnya.

Jika tuntutan mereka tak dipenuhi, para pedagang mengancam akan kembali berdemo di depan kantor Kemendag dengan jumlah yang lebih banyak. Pedagang yang hadir saat ini, katanya, baru sebagian dari Jakarta, Makassar, dan Bandung. Mereka juga mengatakan tidak akan beranjak dari Kemendag hingga Zulhas hadir di lokasi.

"Jika Zulkifli Hasan dari Kementerian Perdagangan tidak men-



Himpunan Pedagang Pakaian Impor Indonesia (HPPII) demo di depan Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (6/6/2023). (istimewa)

dengarkan ini, beribu kami berserak di Indonesia, beribu kami bawa masa dari provinsi, ini baru perwakilan, kami akan kembali beribu orang," kata Deson. (wid,rls,ant/dya)

Dua Kepala OPD Pemprov Jatim Jadi Saksi di Sidang Sahat, Siapa Selanjutnya?

SURABAYA – Sidang kasus suap ijon dengan terdakwa Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Selasa (6/6/2023), Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami verifikasi kelompok masyarakat (Pokmas) penerima dana hibah pokir DPRD Jatim.

Dalam sidang ini JPU KPK menghadirkan empat saksi dari Pemprov Jatim, dua diantaranya adalah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Kepala Dinas PU Bina Marga, Edy Tambeng Widjaja, dan Kepala Dinas PU Sumberdaya Air, Baju Trihaksoro. Kemudian ada Kabid Perbendaharaan di BPKAD Jatim, Saiful Anam dan Aryo Dwi Wiratno, PNS di Dinas PU Bina Marga.

Aryo menjadi saksi pertama dalam sidang kali ini. Dirinya dicecar soal nama Pokmas Gagal Paham. JPU KPK Arif Suhermanto mempertanyakan proses verifikasi Pokmas yang mengajukan proposal atau mendapat anggaran dari dana hibah ini. "Soal nama Pokmas Gagal Paham, apakah saudara tahu itu. Apakah saudara melakukan pengecekan?" tanya Arif, dikutip dari WartaTransparansi.com

Pertanyaan JPU itu pun dijawab saksi Aryo dengan menyatakan bahwa proses verifikasi Pokmas tidak berada pada dirinya. Namun dilakukan oleh pihak lain. "Kita hanya melakukan evaluasi bukan verifikasi. Cek lapangan dilakukan oleh UPT," tegasnya.

Namun saat didesak apakah ia mengetahui jika Pokmas Gagal Paham memiliki kantor maupun infrastruktur lainnya, saksi menyatakan tahu. Dari hasil cek lapangan, ia mengetahui jika Pokmas Gagal Paham tidak memiliki kantor. "Setelah di cek, kantor tidak ada. Tapi pengurusnya ada," ungkapnya.

Dalam perkara ini, saksi ternyata juga mengetahui jika ada sekitar 4.805 Pokmas yang mendapatkan dana hibah ini. Untuk setiap Pokmas, diketahui mendapat pencairan dana hibah antara Rp150 juta sampai Rp200 juta.

Tidak hanya Pokmas Gagal Paham saja yang namanya terasa aneh. Namun, beberapa pokmas bernama terkesan asal-asalan juga disebut dalam dakwaan. Antara lain, Pokmas Setengah Dewa, Pokmas Terhampar, Pokmas Sesepuh, Pokmas Air Mata, Pokmas Gembel Elit, Pokmas Kerinduan, Pokmas Fikinaki, Suneo, Pokmas Tong Bajil, dan sebagainya.

Sementara itu, Edy Tambeng Widjaja menyebut sejumlah anggota dewan beberapa kali melakukan intervensi di luar prosedural saat pengajuan dana hibah kelompok



Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Jatim, Edy Tambeng Widjaja menghadiri sidang pemeriksaan saksi kasus dana hibah pokmas yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simandjuntak di PN Tipikor Surabaya, Selasa (6/6/2023)

masyarakat (Pokmas). "Dewan biasanya intervensi menghubungi saya minta supaya hibah cepat cair," kata Edy dikutip dari detik.com.

Saat ditanya tim JPU soal intervensi itu, Edy hanya menjawab para anggota dewan itu sering kali mendesaknya. Namun, ia tak menerangkan siapa saja anggota dewan yang menghubunginya untuk intervensi pencairan dana hibah pokmas. "Ya tanya-tanya kapan cair gitu saja," ucapnya.

Sementara itu, tim JPU, Arif Suhermanto mengatakan bahwa anggota DPRD yang mengintervensi Edy berinisial A. Akan tetapi, JPU masih mendalami dari komisi mana anggota dewan yang disebutkan itu.

"Tadi disampaikan saksi Pak Edy Tambeng itu adalah A, anggota DPRD Jatim. Yang jelas anggota," kata Arif usai persidangan.

Arif Suhermanto juga mengatakan akan memanggil saksi Sherlita Ratna Dewi yang sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo (Komunikasi dan Informasi) Jawa Timur (Jatim) dan juga saksi Citra BS. "Kita akan panggil keduanya nanti," ujar Jaksa Arif usai sidang, dikutip dari beritajatim.com.

Dugaan aliran dana Pokmas ke sejumlah pihak diungkap Jaksa KPK saat memeriksa Ir Baju Trihaksoro Kepala Dinas PU Sumber Daya Alam Propinsi Jatim sebagai saksi dalam sidang dugaan suap dana hibah Pokir ke Pokmas yang dikelola Terdakwa

Sahat Tua P Simandjuntak.

Ada dana yang mengalir ke Sherlita Ratna Dewi sebesar Rp 50 juta dan Citra BS sebesar Rp 75,9 juta. Keduanya diketahui sebagai sekretaris Baju. Menanggapi fakta tersebut, lebih lanjut Arif mengatakan, bukti yang ditanyakan ke saksi tersebut disinyalir uang setoran ke rekening Sherlita dan Citra BS. "Makanya untuk lebih jelasnya, setoran tersebut dari mana kita akan panggil yang bersangkutan," ujar Arif.

Di tahun 2020, Baju sebagai Kepala Dinas di Cipta Karya sedangkan Sherlita masih di Dinas Perhubungan. Pada tahun 2021, Sherlita menjadi sekretarisnya. Selain ke Sherlita, KPK juga membeber bukti aliran dana ke Citra BS sebesar Rp 75,9 juta. Citra BS juga diketahui sebagai sekretaris Baju.

Namun sayangnya Baju tak menjawab secara jelas pertanyaan JPU KPK berkaitan dengan aliran dana tersebut. Selain terkait adanya aliran dana tersebut, Jaksa KPK juga meminta penjelasan pada Baju terkait mekanisme proposal Pokmas masuk ke instansi yang dia pimpin.

Pada awalnya, kata Baju, Dinas PU SDA memilah proposal pekerjaan, pencairan termasuk melakukan survei lapangan. Baju mengatakan bahwa Pokmas yang diajukan Sahat sebagai aspirator ada 40. Semua terlaksana dan uangnya dicairkan.

Selain itu, 40 titik milik aspirator Sahat tercatat nilainya sekitar Rp. 60-

70 milyar di Dinas Cipta Karya saja. Terkait LPJ, saksi mengatakan, untuk terdakwa Sahat belum melakukan pengecekan. Sebab menurut pergub, jika LPJ tidak dibuat akan diberi peringatan 1 sampai 3. Jika masih juga belum diberikan atau dibuat maka akan dilaporkan ke inspektorat untuk ditindak lanjuti.

Diketahui, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kalau Sahat diduga menerima uang suap sebesar Rp39,5 miliar dari dua penyuap, yakni, Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi.

Sahat didakwa dengan dua pasal. Pertama terkait penyelenggara negara Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dakwaan kedua terkait suap, Pasal 11 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 65 ayat (1) KUHP. (lut/dya)



Dira Sugandi

Kenang Sosok Ayah

SOLOIS Dira Sugandi atau yang dikenal lewat nama panggung Dira, menjadikan penampilannya pada Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2023 sebagai momentum untuk mengenang segala hal baik dari sosok mendiang sang ayah.

"Lagu yang akan saya nyanyikan berikut ini, membawa kenangan saya kepada sosok ayah yang meninggal tiga tahun lalu akibat diabetes. Beberapa tahun sebelum kepergiannya, tim dokter sempat melakukan amputasi pada salah satu bagian tubuh ayah dan setelah itu dia benar-benar menjadi orang yang berbeda," ujar Dira dari atas panggung All-Accor Live Limitless Stage, Sabtu (3/6/2023) malam.

Sebelum proses operasi tersebut, Dira mengingat sosok sang ayah sebagai orang yang sangat "hidup" dan memiliki selera humor yang bagus.

Tetapi, setelah itu, kenang Dira, ayahnya mulai enggan keluar rumah dan cenderung menjadi seorang yang pendiam.

"Dulu, dia bisa melakukan apa saja sama seperti MacGyver (karakter fiktif protagonis dari serial televisi era '80-an). Saya sangat merindukan beliau. Tetapi, menurut saya, saat ini dia sudah beristirahat dengan tenang di surga dan saya percaya dia menemani saya malam ini," kenang Dira yang tak kuasa menahan lelehan air mata, kemudian melantunkan lagu "A House Is Not A Home" dengan penuh penjiwaan.

Ayah Dira adalah seorang musisi bernama Rudiama Sugandi yang wafat pada 18 Februari 2020 silam. Ketika ayahnya wafat di Bandung, Dira diketahui tengah berada di Los Angeles, Amerika Serikat.

"Terima kasih. Bagi kalian yang masih punya dua orang tua lengkap, boleh disayang-sayang, please habiskan waktu sebisa mungkin selama mereka masih ada. Janji ya, pulang dari sini telepon orang tua dan bilang 'I love you mom, I love you dad'. I love you all," imbuh Dira usai membawakan lagu "A House Is Not A Home" lantas melanjutkan penampilan lewat lagu hits "Close to You".

Tampil mengenakan gaun berkilau bernuansa keperakan, Dira menghadirkan penampilan dengan kualitas vokal sempurna kala berkolaborasi dengan Ron King Big Band dan konduktor musik Mery Kasiman dalam membawakan karya-karya terbaik komposer legendaris Amerika, Burt Freeman Bacharach.

"Banyak sekali lagu bagus dari Burt Bacharach, tapi, kami hanya mendapatkan durasi satu jam. Apakah kita harus minta panitia untuk memberikan waktu tambahan? Apakah kita harus bikin ini setiap tahun?" tanya Dira yang disambut persetujuan massa.

Hadir di hadapan ratusan kepala, Dira sukses membawakan nomor-nomor ciptaan Burt Bacharach yaitu "I'll Never Fall in Love Again", "Walk On By", "A House Is Not A Home", "Close To You", "What The World Needs Now", "That's What Friends Are For", "Say A Little Prayer", dan termasuk salah satu lagu yang terbilang rumit dan menantang untuk dibawakan setiap penyanyi yaitu "Alfie".

Dira Julianti Sugandi lahir pada 29 Juli 1979 di Bandung, Jawa Barat. Ia dikenal seorang pemeran dan penyanyi Indonesia keturunan Sunda.

Pada umur 9 tahun, Dira Sugandi memenangkan peringkat kedua dalam kompetisi menyanyi anak-anak.

Untuk memuluskan karier bermusiknya, ia mengikuti les vokal di Elfa Music Studio setelah lulus SMA.

Ia memulai kariernya sebagai penyanyi sambil kuliah jurusan Musik di Universitas Pelita Harapan.

Ia pernah manggung bersama Keith Martin di Bandung pada tahun 2005 silam, serta berduet bersama Jason Mraz dalam Java Jazz Festival pada tahun 2009.

Pada tanggal 13 November 2011, Dira Sugandi melepas masa lajangnya dan menikah dengan seorang pria bernama Elfa Zulham Warongan.

Pada tahun 2012, Dira Sugandi menjadi juri dalam salah satu ajang pencarian bakat menyanyi dan pada tahun 2014, ia menjadi ketua juri.

Pada tahun 2017, Dira Sugandi meluncurkan album double single (sisi-A dan sisi-B) dengan lagu Langit dan Pelangi. (berbagai sumber)



BIODATA DIRA SUGANDI

Nama Asli :
Dira Julianti Sugandi

Nama lain :
Dira sugandi

Tanggal Lahir :
29 Juli 1979

Kota kelahiran :
Bandung

Profesi :
penyanyi dan model

Genre :
Jazz, R & B, Soul Funk

Tahun aktif :
2000 – sekarang

Suami :
Elfa Zulham Warongan

Anak :
Savanna Azura Warongan



DIKAITKAN DENGAN KEMATIAN CONNIE NURLITA, SERANGAN JANTUNG SANGAT FATAL

PENYANYI dangdut senior Connie Nurlita meninggal dunia, Selasa (30/5/2023) di pagi hari. Kematian-nya disebut tiba-tiba lantaran dipicu oleh serangan jantung.

"Beliau tidak sakit sama sekali. Serangan jantung tadi pagi," kata salah satu pihak manajemen Connie kepada media, Selasa (30/5).

Serangan jantung (myocardial infarction atau MI) tergolong kondisi darurat medis yang disebabkan suplai darah ke jantung tiba-tiba tersumbat oleh bekuan darah. Penyakit jantung

koroner (PJK) adalah pemicu utama dari kondisi tersebut.

PJK membentuk plak pada pembuluh darah jantung akibat timbunan kolesterol. Satu plak yang pecah bisa menimbulkan gumpalan atau sumbatan.

Semakin banyak sumbatan, maka otot jantung kian rusak sehingga fungsinya tidak lagi berjalan dengan normal.

Selain PJK, terdapat faktor risiko lain dari serangan jantung, misalnya tekanan darah tinggi (hipertensi), merokok, gaya hidup tidak sehat, stres, dan obesitas.

Juga beberapa faktor yang tidak dapat diubah, seperti pertambahan usia dan penyakit keturunan.

Dikutip dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC), seseorang yang mengalami serangan jantung dapat merusak organ jantung. Juga, dapat mempengaruhi ritme jantung dan kemampuannya untuk memompa darah ke seluruh tubuh.

Jika tak ditangani dengan cepat, serangan jantung dapat menyebabkan kerusakan jantung permanen dan kematian. Selain itu, beberapa komplikasi ini bisa juga dialami, seperti: Aritmia (irama jantung yang tidak normal), Gagal jantung, Masalah katup jantung, Henti jantung mendadak, Depresi dan kecemasan.

Komplikasi mekanis dari serangan jantung, seperti defek septum ventrikel atau pecahnya dinding bebas. Ini lebih mungkin terjadi dengan pengobatan serangan jantung yang tertunda.

Sebelumnya, spesialis jantung dan pembuluh darah dr Dian Larasati SpJP mengatakan beberapa keluhan terkait serangan jantung kerap diabaikan pasien. Nyeri dada yang muncul seringkali dianggap keluhan biasa.

"Terutama nyeri ketika aktivitas dan ketika dia istirahat hilang, nah itu yang paling khas buat penyempitan pembuluh darah. Bila terasa berulang dan semakin sering, bisa jadi tanda menjelang serangan jantung, nah kadang kalau kaya gitu keluhannya suka diabaikan, dikira pegal, GERD," ujar dr Dian.

Keluhan yang hilang timbul itu yang akhirnya membuat pasien tidak lantas memeriksakan diri ke dokter untuk melihat risiko serangan jantung.

Sayangnya, tidak bisa diprediksi berapa lama perkiraan serangan jantung terjadi sejak keluhan awal muncul.

"Yang jelas bedanya kalau serangan jantung itu lebih nyeri dan terus-menerus dirasakan, bisa di dada kiri, bisa di punggung ke rahang, tangan, bisa macam-macam, hilang kesadaran juga bisa," sebutnya.

"Nyeri disertai mual, muntah, keringat dingin, itu gejala paling khas dari serangan jantung," tambahnya. (Detik)

●●● CIRI-CIRI UMUM SERANGAN JANTUNG

- Nyeri dada yang mungkin terasa seperti tertekan, sesak, nyeri, diremas atau nyeri
- Nyeri atau rasa tidak nyaman yang menjalar ke bahu, lengan, punggung, leher, rahang, gigi atau terkadang perut bagian atas
- Keringat dingin
- Kelelahan
- Gangguan pencernaan
- Sakit kepala ringan atau pusing tiba-tiba
- Mual
- Sesak napas



CONNIE NURLITA

MEDIA SOSIAL DIGUGAT KARENA RUSAK MENTAL PELAJAR



SEBUAH distrik sekolah di Maryland, Amerika Serikat (AS) menggugat perusahaan Meta, Google, Snap, dan ByteDance (perusahaan yang menaungi Tiktok) karena platform media sosial dari perusahaan tersebut dianggap menjadi penyebab krisis kesehatan mental para murid di sana.

Dilaporkan oleh The Verge, Sabtu waktu setempat, gugatan tersebut diajukan oleh Howard County Public School System (HCPSS) pada Kamis (1/6).

Badan distrik sekolah tersebut mengklaim media sosial adalah produk adiktif dan berbahaya yang mengubah pikiran, perasaan, dan perilaku anak-anak.

Gugatan HCPSS mengutip daftar fitur dari sejumlah media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat, dan Tiktok yang dianggap membahayakan anak-anak seperti fitur for your page (FYP) pada Tiktok dan algoritma rekomendasi konten di Facebook dan Instagram.

Beberapa tuduhan lain yang dilaayangkan HCPSS adalah efek perbandingan sosial negatif dan tidak sehat dari konten pada sejumlah media sosial yang menyebabkan permasalahan pada mental dan fisik anak.

Selain itu, setiap aplikasi media

sosial juga dianggap memiliki fitur kontrol orang tua dan keamanan konten yang buruk sehingga dituduh mempromosikan eksploitasi seksual anak.

Meta, Google, dan Snap menyangkal tuduhan tersebut di mana masing-masing perusahaan mengklaim mereka terus memblokir konten berbahaya dan melakukan penyaringan agar konten yang akan ditampilkan

aman dilihat anak-anak.

Tidak hanya di Maryland, distrik sekolah di Florida, California, Pennsylvania, New Jersey, Alabama, Tennessee, negara bagian Washington, dan wilayah lain juga melayangkan gugatan serupa terkait dengan efek negatif media sosial terhadap kesehatan mental anak.

Mengutip halodoc hasil penelitian yang dilakukan oleh Pew Research Center, media sosial hampir tidak bisa dipisahkan dari kehidupan remaja.

Di satu sisi keberadaan media sosial dapat membantu remaja mengembangkan keterampilan komunikasi, berteman, mengejar bidang minat, dan berbagi pemikiran dan ide.

Namun di sisi yang lain, media sosial memiliki dampak negatif pada remaja termasuk risiko penyakit mental. National Institute of Mental Health melaporkan bahwa penggunaan media sosial dapat meningkatkan risiko gangguan mental pada remaja usia 18-25 tahun.

Penelitian yang dilaporkan dalam jurnal JAMA Psychiatry menemukan bahwa remaja yang menggunakan media sosial lebih dari tiga jam per hari berisiko tinggi terhadap masalah

kesehatan mental terutama masalah internalisasi alias citra diri.

Media sosial memang memiliki efek positif pada anak-anak dan remaja, baik dengan mengajarkan keterampilan sosial, memperkuat hubungan, maupun hanya bersenang-senang.

Namun, penggunaan terus-menerus dari platform ini juga dapat memiliki dampak negatif, terutama pada kesehatan mental dan kesejahteraan pengguna muda.

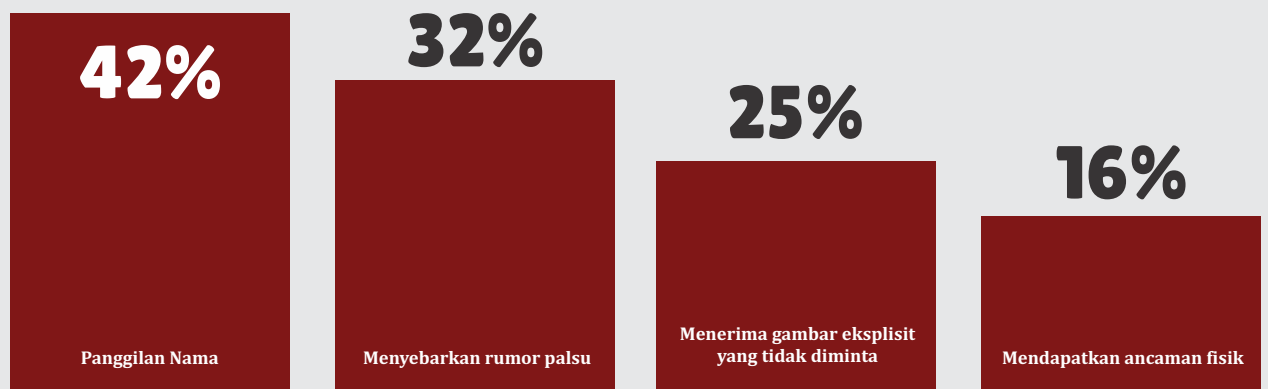
Hal yang membuat kondisi ini semakin buruk adalah ketika remaja menganggap hal-hal negatif yang terjadi di media sosial sebagai hal yang lumrah dan "risiko" dari bermain di media sosial. Jika hal ini terus dibenarkan, maka dapat memicu masalah yang lebih serius lagi.

Bukan tak mungkin remaja yang menjadi korban penganiayaan di online justru malah melakukan hal yang sama kepada orang lain.

Menggunakan media sosial dengan cara yang cerdas adalah salah satu upaya membentengi diri dari dampak negatif konsumsi media sosial terhadap kesehatan mental (berbagai sumber)

BAGAIMANA PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DAPAT MENINGKATKAN RISIKO KESEHATAN MENTAL REMAJA?

Faktanya adalah di media sosial remaja juga mengalami perlakuan buruk. Survei Pew Research Center tahun 2018 tentang remaja Amerika Serikat (AS), menunjukkan bahwa satu dari enam remaja telah mengalami setidaknya satu dari enam bentuk perilaku penganiayaan online mulai dari



HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)

MEDIA TERVERIFIKASI



BIRO : SURABAYA: LUTFI YUHANDI | **MOJOKERTO :** RAHMAD SURYADI | **GRESIK-LAMONGAN :** ASEPTA YOGA P (ID SERTIFIKASI 3189) | **KEDIRI-JOMBANG-NGANJUK :** GATOT SUNARKO | **TAPAL KUDA (PASURUAN-PROBOLINGGO BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI) :** IMAN SANTOSO, | **MADIUN :** IMAM GHOZALI (ID SERTIFIKASI 11563), | **BLITAR :** ARIEF SUKAPUTRA | **TRENGGALEK :** ANNGA PRAYOGA

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO | **SEKERTARIS** ISTIDHA NUR AMANAH,
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, KIKI AMALIA GUYEN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM
 Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenalan wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenalan wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenalan atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

KEBIASAAN DUDUK SILANGKAN KAKI BERISIKO BURUK BAGI KESEHATAN



DUDUK menyalangkan kedua kaki kerap dilakukan tanpa disadari. Kebiasaan itu terjadi begitu saja ketika Anda tengah mengobrol dengan seseorang sembari duduk di kursi atau sofa.

Dilansir dari Bestlife, terapis fisik & olahraga Hudson Premier Sandra Gail Frayna menyarankan untuk membatasi kebiasaan duduk menyalangkan dua kaki.

Pastikan kebiasaan menyalangkan kedua kaki itu dilakukan tidak lebih dari 15 menit.

kebiasaan duduk dengan menyalangkan kaki berisiko buruk untuk kesehatan tubuh.

Sebaliknya, posisi duduk yang terbaik adalah kedua kaki menyentuh tanah dengan lutut saling berdekatan.

Lantas, apa dampak buruk duduk dengan kedua kaki menyalang?

BAHAYA DUDUK MENYILANGKAN KAKI

Masih dari sumber yang sama, duduk dengan menyalangkan kaki bisa menimbulkan efek buruk bagi kesehatan, di antaranya:

1. Hipertensi

Menyalangkan kaki dapat menyebabkan tekanan darah meningkat untuk sementara waktu.

Dokter bersertifikat di bidang anesthesiologi dan manajemen nyeri intervensi Sean Ormond mengatakan, menyalangkan kaki dalam waktu lama

dapat membatasi aliran darah.

"Saat Anda menyalangkan kaki, darah harus melewati saluran yang lebih kecil dan pembuluh darah bisa menjadi padat sehingga darah lebih sulit kembali ke jantung Anda," jelasnya.

2. Pembekuan darah

Aliran darah yang terbatas juga mampu meningkatkan risiko pembekuan darah.

Hal ini karena kontraksi otot membantu menggerakkan darah melalui sirkulasi vena.

Akibatnya, duduk terlalu lama dengan posisi kaki menyalang bisa memperlambat aliran darah dan meningkatkan risiko pembekuan darah.

3. Skoliosis

Duduk dengan kaki menyalang membuat tubuh menjadi tidak seimbang. Akibatnya, dalam jangka waktu lama postur tubuh akan bermasalah.

Posisi duduk yang tidak seimbang membuat otot dan ligamen di tulang belakang menegang dan tidak nyaman. Hal itu bisa berakibat munculnya masalah nyeri punggung, leher, dan bahu.

Dilansir dari New York Post, risiko skoliosis juga meningkat setelah beberapa waktu terbiasa duduk dengan kaki menyalang.

Jika dibiarkan, kebiasaan sederhana ini bisa merusak saraf,

terutama untuk kompresi saraf peroneal yang terletak di kaki bagian bawah.

4. Masalah pinggul

Kebiasaan menyalangkan kaki di bagian lutut bisa berdampak munculnya permasalahan di pinggul. Sebab, posisi duduk seperti itu memberikan tekanan pada persendian di pinggul.

"Jika dilakukan secara berlebihan, hal itu dapat menyebabkan kondisi ortopedi tertentu, seperti nyeri pinggul atau displasia pinggul," kata Ormond, dikutip dari Bestlife.

5. Kelumpuhan

Skenario paling buruk, kebiasaan duduk menyalangkan kaki berisiko kehilangan kemampuan untuk menggerakkan kaki.

Hal ini disebut dengan kelumpuhan kaki menyalang. Penyebabnya karena adanya tekanan pada saraf yang cukup lama sehingga saraf itu akan lumpuh.

Umumnya, kelumpuhan itu terjadi sementara saja. Gejalanya akan hilang dalam beberapa waktu.

7. Produksi sperma terganggu

Bagi pria, kebiasaan duduk menyalangkan kaki dalam waktu lama juga menimbulkan risiko pada jumlah sperma. Hal itu karena adanya perubahan suhu tubuh.

Dikutip dari New York Post, testis harus tetap berada di antara 2 dan 6 derajat Celsius di bawah suhu tubuh standar.

Ketika pria menyalangkan kaki, suhunya bisa naik hingga 3,5 Celcius. Itulah beberapa masalah kesehatan yang berpotensi muncul jika Anda memiliki kebiasaan duduk menyalang dalam waktu yang lama (Kompas)



Target Satgas BLBI ... (dari hal 1)

MASA kerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) akan berakhir pada Desember 2023. Sementara hak negara yang dikumpulkan belum mencapai target. Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban pun meminta kepada Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar masa kerja diperpanjang.

"Kami berpendapat kiranya masa satgas ini boleh diperpanjang," kata Rio dalam acara Serah Terima Aset Eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia di Gedung Djuanda, Kemenkeu, Selasa (6/6/2023)

Menurut Rionald, sejauh ini kerjasama yang terjadal antar Kementerian Lembaga sudah berjalan baik. Akan tetapi Satgas BLBI masih membutuhkan waktu yang lebih panjang. "Karena kerjasama ini bisa berjalan dengan baik tapi kami me-yertakan keputusannya ke pengaruh tetap kami akan menyiapkan dokumen dan bukti untuk persiapan pelaporan kepada pak Presiden yang akan kami sampaikan melalui pengaruh pada Oktober nanti," paparnya.

Diketahui, hingga 25 Maret 2023 Satgas BLBI baru bisa mengumpulkan hak negara senilai Rp 28,53 triliun, sedangkan targetnya Rp 110 triliun hingga akhir 2023. Artinya, selama tiga tahun beroperasi Satgas BLBI baru bisa merealisasikan 25,83% penagihan hak negara dari para obligor atau debitur BLBI.

Sementara menurut data terbaru (30 Mei 2023), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md selaku Ketua Tim Pengarah Satgas BLBI, mengatakan baru mampu mengumpulkan Rp 30,65 triliun (30% dari target). Dia mengakui, untuk bisa mencapai seluruh pengumpulan hak tagih negara yang mencapai Rp 110 triliun membutuhkan waktu 5 tahun lagi.

"Ini kalau diperpanjang 5 tahun lagi baru bisa dapat semua itu," kata Mahfud saat konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (6/6/2023).

Mahfud berujar, telah terkumpulnya dana dari para obligor atau debitur sekitar 30% itu sebetulnya sudah patut disyukuri, sebab saat dibentuknya satgas ini banyak pihak yang meragukan 10% saja tidak akan tercapai. Karena itu ia mengaku membuka opsi untuk memperpanjang masa tugas Satgas BLBI.

Sebab, ia berpendapat, melalui Satgas BLBI kerja penagihan lebih cepat karena pihak terkait seperti Kementerian ATR/BPN, Bareskrim Polri, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, BPPK, hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berkumpul menjadi satu sehingga proses penanganannya berkesinambungan.

"Nah sekarang semua kumpul di sini AHU nya ada, yang hitung ada BPKP dan seterusnya jadi tim seperti ini nampaknya perlu dilanjutkan sampai dapat semua Rp 110 triliun," tutur Mahfud.

Khusus hingga akhir tahun ini,

atau sampai berakhirnya masa kerja Satgas BLBI, Mahfud meyakini total penagihan yang bisa terkumpul bisa mencapai 50% dari target. Ini pun kata dia juga senada dengan yang sudah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Jadi alhamdulillah kami berhasil tarik 30% dan kita usahakan akhir tahun ini sudah mencapai 50% di tambahan tindakan-tindakan signifikan lainnya," ujar Mahfud. "Karena kepada para penanggung utang BLBI itu dokumennya lengkap karena mereka punya utang ke negara tidak akan hilang catatannya dan tidak akan dilepaskan sebelum melunasi dan atau menyelesaikan ke negara," ungkapnya.

Pihaknya juga sudah menyiapkan sanksi keras bagi obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang nekat tak mau bayar utang ke negara. Sanksi keras itu berupa pengekangan ke luar negeri, pencabutan paspor, hingga pencabutan hak kredit.

Mahfud mengatakan sanksi administratif ini sudah masuk dalam Peraturan Pemerintah no 28 tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara. "Kita sudah menyiapkan denda-denda administratif sejak awal dibicarakan. Misalnya, supaya hati-hati ini yang selalu mangkir, mungkin nanti akan ditutup haknya untuk mengambil kredit di bank. Jadi diberi tahu orang ini, nomor ini, tidak boleh," katanya.

"Kemudian paspornya dicabut, tidak boleh berpergian ke luar negeri sampai jelas, kapan mau menyelesaikan, dan berapa utangnya yang diakui," ujarnya.

Mahfud juga mengultimatum bagi semua obligor BLBI, jangan pernah lari dari tanggung jawab. Menurutnya, pemerintah punya dokumen dan data lengkap soal tanggungan negara. Pemerintah tidak akan melepaskan semua obligor sebelum menyelesaikan kewajibannya kepada negara. "Kepada penanggung hutang BLBI ini dokumennya lengkap tidak akan dilepaskan sebelum melunasi sebelum menyelesaikan ke negara," tegas Mahfud.

Lebih lanjut Mahfud mengatakan penempatan sanksi ini akan berlaku setelah Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu mendata siapa-siapa saja yang bisa terkena sanksi. Pasalnya, pe-netapan sanksi akan dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang merupakan unit kerja dari DJKN.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menargetkan, Satgas BLBI bisa mencapai target di

atas 50 persen dari total target Rp110 triliun. "Pak Mahfud sampaikan target 30 persen, kalau dari Rp110 triliun masih kurang pak sedikit. Saya targetnya diatas 50 persen," ujarnya dalam acara Penyerahan Dokumen Aset Eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (6/6/2023).

"Sebelum penutupan BLBI ini kalau bisa masih bisa digas. Biasanya menjelang finish gas lebih kencang," ujar Sri Mulyani. Sementara itu, Bendahara Negara itu meminta kepada Menko Polhukam Mahfud MD untuk memecut kinerja Satgas BLBI. Dia berharap dengan dorongan tersebut target capaian Satgas BLBI bisa terealisasi. "Saya mohon Pak Mahfud tetap sabetin satgasnya, supaya bisa tetap dapatkan," tegasnya.

Di sisi lain, Sri Mulyani juga mendorong agar Mahfud MD memberikan izin untuk memperpanjang masa tugas Satgas BLBI. "Dan tentu tadi secara implisit merasakan momentum sedang naik jadi kalau bisa diperpanjang pak Mahfud. Monggo nanti bapak yang putuskan saya ikut dan biayai jelas," pungkasa dia.

Kesulitan Jual Aset Tommy Soeharto

Di sisi lain, Aset PT Timor Putra Nasional (TPN) yang disita terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) belum juga laku setelah dilelang sebanyak 3 kali. Kementerian Keuangan putar otak agar aset yang dimiliki Hutomo Mandala Putra atau yang akrab Tommy Soeharto itu bisa dioptimalkan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan idealnya aset sitaan BLBI memang dijual dengan cara pelelangan agar pemerintah mendapatkan keuntungan besar. Apalagi bila aset-aset tersebut tampak tidak dibutuhkan oleh kementerian dan lembaga.

"Kalau kita kan maksimalkan manfaatnya ya, kalau tidak terlihat bahwa seluruh KL membutuhkan untuk recover hal Tagih dan kerugian negara yang lalu memang idealnya itu dijual dan kita dapat cash-nya," ungkap Sri Mulyani di kantornya, kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/6/2023).

Namun apabila aset itu tak laku juga dilelang, maka opsi-opsi lain harus diperhatikan. "Kalau jumlah lokasi maupun size-nya tidak memungkinkan tentu saja akan ada mekanisme untuk optimalkan aset itu," ujarnya.

Dirjen Kekayaan Negara Rionald Silaban menambahkan aset jaminan BLBI sendiri secara hukum tak bisa

begitu saja diambil pemerintah. "Untuk aset-aset yang belum laku, internally kami sedang melihat apakah ada cara, karena itu kan aset jaminan. Aset jaminan itu setelah disita dia harus dilelang, artinya secara hukum itu tidak bisa begitu saja ngambil," ungkap Rionald.

Rionald yang juga merupakan Ketua Harian Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI mengungkapkan ada opsi agar aset Tommy Soeharto dan aset sitaan lainnya yang tak laku dilelang bisa dibeli di bawah harga. Opsi ini sedang dikaji pihaknya, akan ada institusi yang nantinya akan membeli aset yang tidak laku dilelang itu dengan harga murah. "Jadi nanti kita akan ini internally kita lagi lihat proses di mana ketika itu dilelang mungkin kita akan siapkan institusi untuk membeli itu di harga bawah baru kemudian kita serahkan," kata Rionald.

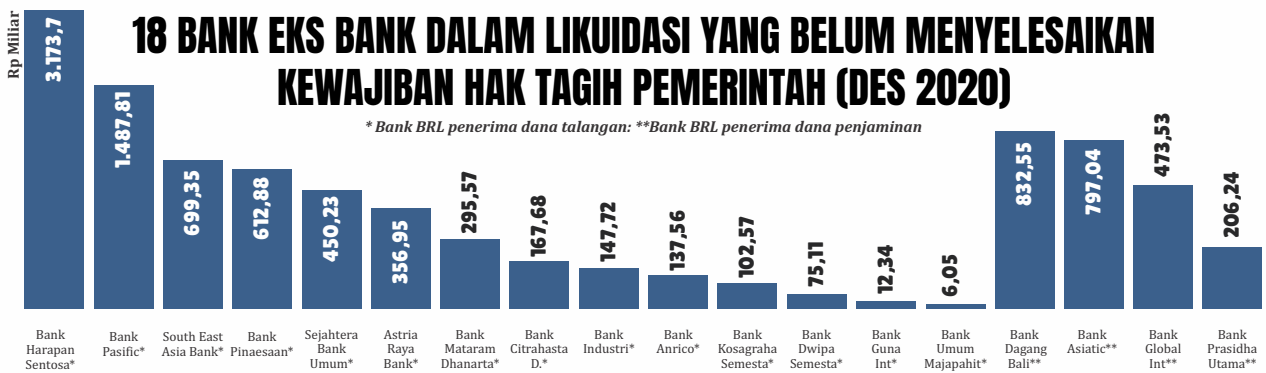
Satgas BLB, Selasa (6/6/2023) secara simbolis juga menyerahkan 226 hektar aset sitaan BLBI senilai Rp1,8 triliun kepada 14 kementerian/ lembaga (K/L) dan 3 pemerintah daerah (pemda). Langkah ini merupakan upaya pemerintah melakukan penangan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang telah tertunggak dari obligor/debitur selama lebih dari 20 tahun.

"Semua berasal dari pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti secara efektif dan efisien," ujarnya.

Rionald merinci, penetapan status penggunaan kepada 14 K/L yaitu Badan Pengawas Pemilu, Kejaksaan, Kemenkeu, Kementerian ATR/BPN, Kepolisian Negara RI, Badan Intelijen Negara, Badan Pusat Statistik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kemudian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komisi Pemilihan Umum, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Yudisial, Badan Narkotika Nasional, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi. "Total aset yang diberikan kepada kementerian/lembaga adalah 84,7 hektar bernilai Rp1,2 triliun yang tersebar di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia," tuturnya.

Sementara untuk hibah ke pemda yaitu Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kota Palembang atas aset dengan total luas 142,1 hektar dan total nilai Rp639,4 miliar. "Aset yang dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat akan digunakan untuk pembangunan Kawasan Ekowisata West Java Creative Forest," katanya. (wid,rls,kum,mer/dya)





FRAKSI - FRAKSI DPRD JATIM CERMATI USULAN RAPERDA PERUBAHAN PERDA DANA CADANGAN PILGUB 2024



Juru bicara fraksi PKS, Hanura dan PBB DPRD Jatim, Lilik Hendarwati menyerahkan pandangan fraksi atas usulan Raperda perubahan Perda no 6 tahun 2022 tentang dana cadangan Pilgub Jatim 2024.

SURABAYA - Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur mencermati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur nomor 6 tahun 2022 tentang Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2024 yang diusulkan oleh eksekutif.

Inisiatif eksekutif untuk mengusulkan Raperda perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2020 ini seiring terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) No. 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota yang mengatur tentang teknis penganggaran maupun pelaksanaan alokasi pendanaan Pilkada serentak tahun 2024.

Dalam SE Mendagri tersebut disebutkan bahwa penentuan alokasi anggaran untuk Pilkada diambilkan dari tahun anggaran 2023 sebesar 40 persen dan tahun anggaran 2024 sebesar 60 persen. Untuk diketahui, dalam Perda Provinsi Jatim nomor 6 tahun 2022 mengalokasikan anggaran untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebesar Rp 600 miliar dan hanya dicairkan pada tahun 2024 saja. Untuk itulah Perda No. 6/2022 tersebut harus dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan SE Mendagri dimaksud.

Atas usulan Raperda perubahan tersebut, DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum Fraksi, pada Senin (5/6/2023) malam. Dalam rapat paripurna tersebut diketahui beberapa fraksi menyatakan setuju,

sedangkan beberapa fraksi lainnya masih meminta penjelasan diantaranya terkait dengan pengalokasian anggaran dengan tujuan supaya menjadi lebih efektif.

Juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ahmad Hilmy, S.Ag., menyatakan bahwa Fraksi PKB dapat memahami adanya usulan mengenai Raperda tentang Perubahan Perda tentang Dana Cadangan ini agar segera dilakukan sebelum eksekutif dan legislatif masuk dalam kesepakatan dan pembahasan tentang Perubahan APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2023.

Meski demikian, fraksi PKB meminta penjelasan lebih detail terkait dengan rincian kebutuhan biaya pelaksanaan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2024 sebesar Rp 600 miliar. "Rincian kebutuhan biaya tersebut sangat penting sebagai dasar untuk menentukan seberapa besar anggaran yang semestinya dicadangkan dalam setiap tahun anggaran," katanya.

Fraksi PKB juga meminta para pihak yang terlibat dalam pembahasan Raperda ini untuk segera membuat formulasi sharing anggaran dengan Kab/Kota yang juga melaksanakan Pemilu di saat bersamaan. Hal ini urgen untuk segera dilakukan mengingat Kab/Kota tersebut juga menunggu kebijakan dari Pemprov Jatim dalam membuat formulasi tersebut.

Sementara itu, juru bicara Fraksi NasDem, Hj. Jajuk Rendra Kresna, S.E., M.M., mengatakan bahwa pembahasan atas materi muatan pokok, skema perangkaan dan sumber penerimaan dan lain sebagainya, sesungguhnya sudah dilakukan pada pembahasan Perda No. 6 Tahun 2022 tahun lalu

secara memadai. Pergeseran secara fundamental sebenarnya tidak ada.

"Kebutuhan perubahan Perda tersebut lebih bersifat regulatif, menyesuaikan arah dari peraturan yang lebih tinggi kedudukannya. Dengan kata lain, perubahan Perda No.6/2022 lebih karena kebutuhan hukum yang bersifat formal. Karena kami berpendapat tidak perlu ada hal-hal yang mendasar untuk diperdebatkan. Mengiringi itu semua, kami sepakat bahwa kita perlu mengakomodir ketentuan yang ada dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ," tandasnya.

Juru bicara dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), H. Rofik, mengungkapkan bahwa Fraksi PPP memahami dan mendukung sepenuhnya terhadap usul Raperda perubahan tentang dana cadangan. "Meningkat secara yuridis formal sudah memenuhi ketentuan per-UU-an yang berlaku, namun demikian kami masih memberikan usul, saran, harapan dan tanggapan," katanya.

Juru bicara fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Agung Suprianto, mengatakan bahwa usulan Raperda perubahan sudah sesuai dengan SE Mendagri yaitu pencairan dana cadangan pada 2023 sebesar 40% dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 14 hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD.

"Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicairkan pada Tahun Anggaran 2023 dan/atau Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tandasnya.

Benyamin Kristianto, juru bicara dari Fraksi Partai Gerindra mengusulkan tiga alternatif yang dapat dilakukan untuk mengakomodir ketentuan dalam SE Mendagri tersebut. Yaitu mencabut Perda tentang Dana Cadangan, kemudian mengkonstruksi ulang kebutuhan kegiatan pemilihan gubernur dengan menggeser seluruh anggarannya pada belanja hibah tahun 2023, mengacu pada ketentuan Pasal 16 ayat 2 Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 41 Tahun 2020.

Alternatif kedua adalah mencabut perda tentang Dana Cadangan kemudian menggeser sebagian anggaran dimaksud pada belanja hibah kegiatan pemilihan dan dicairkan sebesar 40%, sedangkan sisanya dianggarkan pada tahun berkenaan.

"Alternatif ke tiga adalah merubah

Perda tentang Dana Cadangan dengan cara mengurangi anggarannya dari Rp 600 miliar rupiah menjadi Rp 360 miliar rupiah, sementara Rp 240 miliar rupiah dikeluarkan dari Dana Cadangan dan digeser menjadi belanja hibah untuk kebutuhan tahapan kegiatan pemilihan gubernur dan dicairkan pada tahun 2023," tandasnya.

Sementara, Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, Pranaya Yudha juga setuju dengan usulan Raperda perubahan tersebut. Namun demikian fraksi Partai Golkar meminta penjelasan apakah ada pergeseran jumlah anggaran dari yang sudah disepakati melalui Perda Nomor 6 Tahun 2022, apabila demikian, darimana sumber dananya, bagaimana garis besar penggunaannya apakah tidak mengganggu struktur APBD Tahun Anggaran 2023 yang sudah ditetapkan?

Juru bicara fraksi Partai Demokrat Mohammad Rosyidi mengatakan Fraksi Partai Demokrat mengatakan Raperda ini pembahasannya seyogianya dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Dengan kata lain, Raperda dimaksud harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan.

Pandangan berbeda disampaikan oleh fraksi PKS, Hanura dan PBB yang mengatakan bahwa tidak perlu adanya Raperda tersebut. Melalui juru bicaranya, Lilik Hendarwati menyatakan jika dilihat dari substansi isi SE Mendagri nomor 900.1.9.1/435/SJ tertanggal 24 Januari 2023, tak klausul satupun yang memerintahkan kepada Pemerintah Daerah untuk membuat atau merevisi/merubah Perda tentang Pembentukan dana cadangan untuk pemilihan kepala daerah.

SE Mendagri ini hanya memberikan titik fokus pada penjelasan mekanisme hibah anggaran Pilkada tahun 2024. Adapun kalimat wajib dalam SE Mendagri ini hanya memberikan titik tekan pada penganggaran dan pencairan dana hibah Pilkada, yaitu pada Huruf B khususnya angka 5 dan 6 dan huruf C khususnya pada angka 2 dari isi SE Mendagri ini.

"Sehingga dari kedua hal diatas, fraksi mempertanyakan, mengapa pemerintah Provinsi mengusulkan perubahan Perda nomor 6 tahun 2022 ini dengan mengacu pada isi SE Mendagri ini?" tegasnya. (lut/dya/adv)